

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI ANALISIS RASIO KEUANGAN APBD KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009

Oleh

Annafi Indra Tama

Dosen Akuntansi Fakultas Ekonomi UNISMA Bekasi

Abstract

This study aims to find out about the comparison of districts financial performance indicators in Indonesia and to determine whether there are differences in that before and after implementation of Law No.28/2009. In this study, financial performance are valued by indicators of independence, the degree of decentralization, financial dependency areas, the effectiveness, efficiency, and contribution of local taxes and levies at 17 districts financial statement. This study used audited district financial statement to proof the hypothesis. 2010 is claim as the prior period of application of the law, and 2012 as the year after the implementation. The analysis technique used in this study is analytical study of district financial performance. Paired sample t-test with significance level of 0.05 is used to test the hypothesis. The results show that there is significantly difference on district financial performance. In the form of independence indicators, decentralization degree, efficiency of local taxes, contribution of local tax and levies are higher in the period before the implementation, but for financial dependency is lower in the period after implementation. In the other hand, there is no difference in the form of district financial effectiveness before and after implementation of the law.

Keywords : *financial performance, independency of financial, decentralization degree, financial dependency, effectiveness, efficiency and contribution of local tax and levies.*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, akuntabilitas publik merupakan kata kunci. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran Daerah yang berorientasi pada kinerja. Hal tersebut adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas publik Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi.

Penilaian laporan keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas dengan menggunakan analisis rasio-rasio keuangan. Fahmi (2011) mengatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu entitas, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu instansi. Analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui bagaimana kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah (Susantih dan Saptian, 2007).

Perubahan UU No.34 tahun 2000 yang digantikan oleh UU No.28 tahun 2009 mempunyai tujuan utama yaitu ingin meningkatkan perwujudan otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah merupakan salah satu dari sumber pendapatan terbesar untuk Daerah, dengan dialihkannya beberapa jenis pajak dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Kinerja keuangan yang diukur lewat desentralisasi fiskal, upaya fiskal, dan tingkat kemampuan pembiayaan memiliki perbedaan sebelum dan sesudah otonomi daerah, Tingkat efisiensi penggunaan anggaran tidak memiliki perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah otonomi daerah Azhar (2008).

Wahyuni (2011) melakukan penelitian di Kota Malang dengan hasilnya yaitu dari rasio efektifitas PAD didapatkan hasil rata-rata relaisasi PAD diatas 100% yaitu sebesar 100, 97%. Dari rasio pertumbuhan Pendapatan ditemukan bahwa defisit anggaran Kota Malang dari tahun ke tahun juga semakin kecil bahkan pada tahun 2006 mengalami surplus anggaran yakni sebesar Rp 35.721.565.841,45. Dari rasio kemandirian daerah menyatakan kemandirian keuangan kota Malang yang masih rendah dan juga untuk rasio aktivitas keuangan Pemerintah Kota Malang.

Penelitian Ghozali, dkk (2012) membuktikan tentang kinerja keuangan melalui rasio keuangan daerah dengan hasil penelitian yaitu dari rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemandirian yang masih rendah di

tiap daerah, rasio efektifitas kinerja dalam merealisasikan PAD sudah efektif disetiap daerah. Namun hanya beberapa daerah yang belum menunjukkan efektifitas dan efisiensi PAD nya.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

Penelitian terdahulu sudah banyak yang meneliti tentang kinerja keuangan daerah, namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan adanya perubahan undang-undang tentang PDRD UU No.28 Tahun 2009 yang menggantikan UU No.34 Tahun 2000. Fokus penelitian ini adalah mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan sebelum dan setelah penerapan UU No.28 tahun 2009, oleh karena itu fokus penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. Maka, berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian tentang analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui analisis rasio keuangan APBD sebelum dan setelah penerapan UU No. 28 Tahun 2009.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah terdapat perbedaan kemandirian keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009?
- 2) Apakah terdapat perbedaan tingkat derajat desentralisasi pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009?
- 3) Apakah terdapat perbedaan ketergantungan keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009?
- 4) Apakah terdapat perbedaan tingkat efektifitas keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009?
- 5) Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009?
- 6) Apakah terdapat perbedaan derajat kontribusi pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009?

I. 3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009.
- 2) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan derajat desentralisasi daerah kabupaten/ kota se-Indonesia sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009.
- 3) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten/ Kota se-Indonesia sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009.
- 4) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara tingkat efektifitas keuangan daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009.
- 5) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara tingkat efisiensi keuangan daerah kabupaten/ kota se-Indonesia sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009.
- 6) Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara tingkat derajat kontribusi pajak dan retribusi Kabupaten/Kota se-Indonesia sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Resource-Based View Theory (RBV)*

Berdasarkan teori berbasis sumber daya (*resource based theory*), Barney (1991) dalam Hoffman (2000) mengajukan definisi formal yang lebih dekat dengan pengertian keunggulan bersaing berkelanjutan yang sering dipakai saat ini, yaitu keunggulan yang dicapai secara terus menerus dengan mengimplementasikan strategi pencapaian nilai-nilai unik yang tidak dimiliki pesaing.

RBV teori bila dikaitkan dengan tata pemerintahan khususnya di daerah, maka keunggulan yang dimaksud adalah memiliki kompetensi dalam melakukan pengelolaan keuangan yang akuntanbel dan paling relevan dengan menghasilkan aturan/ kebijakan tertulis melalui suatu Undang-Undang di bidang penerimaan dan Undang-Undang dibidang pengeluaran.

2.2 Rasio Keuangan Daerah

2.2.1 Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah (Mahmudi, 2007).

2.2.2 Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007:128):

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.2.3 Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007:128):

$$\text{Rasio ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

2.2.4 Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektifitas PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh PAD dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimal 1 atau 100% (Mahmudi, 2007).

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Rasio efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD yang dianggarkan. Rasio Efektivitas PAD dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007: 129):

$$\text{Rasio efektifitas PAD} = \frac{\text{Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

2.2.5 Rasio Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efisiensi pajak daerah adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi belanja dengan realisasi pendapatan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa belanja yang dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan (Hamzah, 2006).

Rasio efisiensi pajak daerah tersebut diukur dengan (Mahmudi, 2007):

$$\text{Rasio Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}$$

2.2.7 Derajat Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah

Derajat kontribusi Pajak dan Retribusi daerah digunakan untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dan Retribusi daerah dengan total Pendapatan Asli Daerah (Halim, 2002). Dapat dirumuskan sebagai berikut:

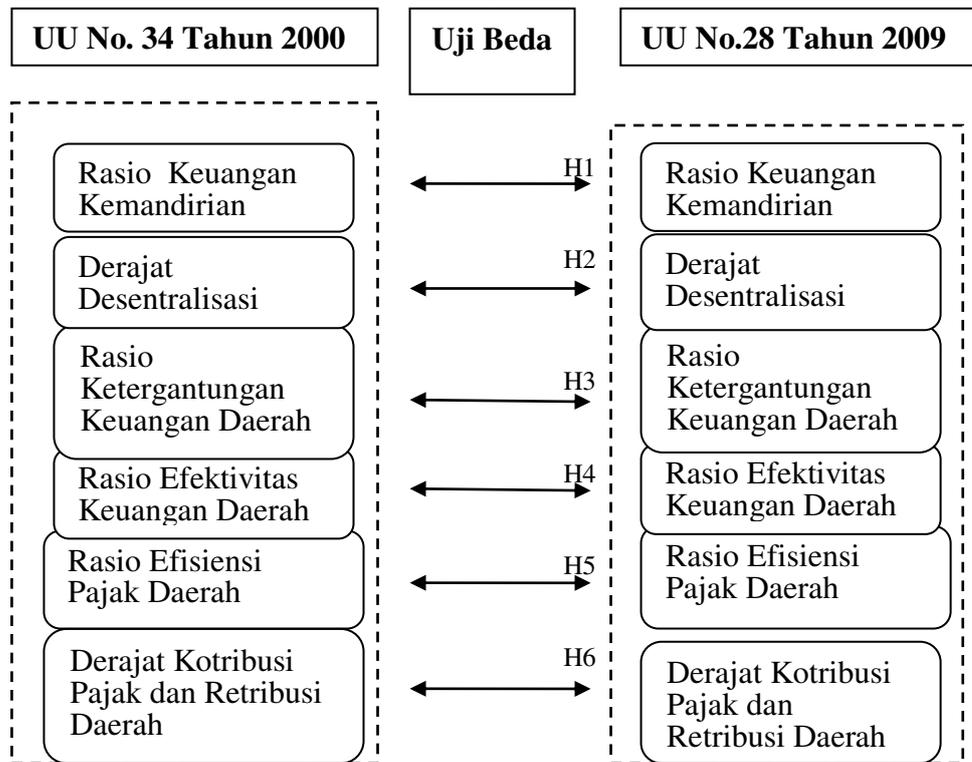
$$\text{Derajat Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Total Penerimaan PAD}}$$

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis indikator kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota se-Indonesia yang terdiri dari indikator kemandirian keuangan daerah, derajat desentralisasi,

ketergantungan keuangan daerah, efektifitas keuangan daerah, efisiensi pajak daerah, kontribusi pajak daerah dan kontribusi retribusi daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah. Implementasi bentuk komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yaitu dengan digantinya UU No. 34 Tahun 2000 dengan UU No. 28 Tahun 2009 merupakan langkah maju untuk meningkatkan otonomi daerah sehingga dalam penelitian membandingkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Pengembangan Hipotesis

Adanya perubahan Undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana adanya sebagian pajak yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Pusat namun kali ini dialihkan sepenuhnya untuk memungut oleh Pemerintah Daerah maka pendapatan pajak dan retribusi daerah akan meningkat. Semakin besar pajak yang daerah yang diterima oleh daerah, maka semakin besar pendapatan asli daerah, dan semakin besar pula kemandirian suatu daerah.

H1: Tingkat kemandirian keuangan daerah sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 lebih tinggi.

Pengalihan beberapa jenis pajak ke Pemerintah Daerah yaitu Setelah penerapan UU No.28 Tahun 2009 dimungkinkan derajat desentralisasi daerah akan semakin besar dibandingkan dengan sebelumnya, dikarenakan Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dari sektor pajak dan retribusi Daerah.

H2: Tingkat Derajat Desentralisasi daerah sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 lebih tinggi.

Tingkat ketergantungan keuangan daerah setelah penerapan UU No.28 Tahun 2009 akan berbeda dengan sebelum penerapan, hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah meningkat yang akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah cukup besar maka dana transfer dari pusat/provinsi akan semakin kecil kontribusinya terhadap total pendapatan daerah.

H3: Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 lebih rendah.

Efektivitas keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 memiliki perbedaan dapat lebih tinggi dan juga lebih rendah, tergantung bagaimana kemampuan daerah dalam membuat anggaran yang akan dapat direalisasikan. Penelitian Kurniati (2012) menunjukkan bahwa efektivitas keuangan daerah menunjukkan hasil yang lebih rendah setelah krisis ekonomi 2008, sedangkan penelitian Wahyuni (2011), Ghazali (2012) dan Dhamanhuri (2012), menemukan hasil bahwa efektivitas daerah yang lebih efektif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

H4: Tingkat Efektivitas keuangan daerah sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 semakin tinggi

Penerapan UU No.28 Tahun 2009 akan memberikan dampak meningkatnya pendapatan pajak daerah, disisi lain juga daerah membutuhkan dana yang cukup besar untuk dapat menjalankan Undang-undang tersebut, maka efisiensi pendapatan pajak daerah dapat lebih efisien atau bahkan menurun tingkat efisiensinya

dibandingkan sebelum penerapan tergantung dari bagaimana kesiapan daerah tersebut dalam menerapkan UU No.28 Tahun 2009.

H5: Tingkat Efisiensi Pajak Daerah sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 lebih tinggi

Derajat kontribusi pajak dan retribusi daerah adalah rasio yang menggambarkan kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula (Suprpto, 2006). Semakin besar kontribusi komponen pendapatan asli daerah, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah dalam menggali sumber potensinya (Sari, 2010).

Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang paling berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dengan penerapan UU No.28 Tahun 2009 daerah mendapatkan pengalihan pajak dan retribusi sehingga daerah mendapat pendapatan dari pajak dan retribusi lebih besar dibandingkan undang-undang sebelumnya.

H6: Tingkat Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 lebih besar.

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Pengambilan populasi dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive population*, yakni pengambilan populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diperiksa disetiap perwakilan BPK setiap Kabupaten atau Kota dan dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPK-RI). Kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah kriteria berdasar pertimbangan (*judgement*). Pemilihan Kabupaten atau Kota tersebut sebagai objek penelitian dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Kabupaten atau Kota tersebut sudah menerapkan UU No.28 tahun 2009 yang dapat dilihat dari yang menjadi pajak daerah, diantaranya: Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Sarang Wulung, Pajak Air dan Tanah sampai dengan tahun 2012.
- 2) Memiliki laporan keuangan dan data-data yang dapat diakses dan dianalisis, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi APBD, Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.
- 3) Ketersediaan Laporan Hasil Pemeriksaan di BPK yang sudah dapat dipublikasikan.

Dari Kriteria tersebut, maka di dapatkan bahwa mulai dari awal berlakunya UU No.28 Tahun 2009 ini per 1 Januari 2011 hanya baru 1 Kota yang langsung menerapkan undang-undang tersebut yaitu Kota Surabaya, selanjutnya di tahun 2012 mengikuti 16 Kabupaten dan Kota lainnya, maka total populasi penelitian ini adalah 17 Kabupaten/Kota. Dari hasil yang di dapatkan populasi yang relatif kecil, maka seluruh populasi yang memenuhi kriteria tersebut dijadikan sampel penelitian. Penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasinya disebut sampel total atau sensus. Penggunaan ini berlaku jika anggota populasi relatif kecil (Usman and setiady, 2006).

Dalam menentukan jumlah sampel di setiap populasi, dapat ditentukan dengan menggunakan rumusan yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael (dalam Sugiyono, 2012:69) sebagai berikut:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana:

λ^2 dengan $dk = 1$, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%.

$P = Q = 0,5$; $d = 0,05$; $S =$ jumlah sampel

Berdasarkan rumusan tersebut dapat dihitung jumlah sampel dari populasi yang tersedia. Rumusan tersebut telah dibentuk dalam sebuah tabel mulai dari populasi 10 sampai dengan 1.000.000. Dari hasil pengamatan di tabel Isaac dan Michael dengan taraf tingkat kesalahan (s) 1% dengan jumlah populasi (N) sebanyak 17, maka didapatkan jumlah sampel yang digunakan adalah 17. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini hanya sebanyak 4 Kabupaten serta 13 Kota dengan total keseluruhan yaitu 17 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan terdiri dari pemerintah daerah Kota Surabaya, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Palembang, Kota Gorontalo, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kota Palu, Kota Pekanbaru, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Pontianak, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Semarang, Kab. Sukoharjo, Kota Yogyakarta.

3.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel penelitian dengan Paired *Samples T Test*. Jika data yang digunakan terdistribusi secara tidak normal, maka uji yang digunakan uji *Wilcoxon Signed-rank Test*. Untuk melakukan uji beda rata-rata dengan *t-test*, data yang digunakan adalah data yang bertipe kuantitatif.

Uji t mengetahui perbedaan rata-rata dan sampel yang berhubungan atau berpasangan (*paired sample t-test*). Melalui pengujian ini dapat diketahui signifikan perbedaan rata-rata dua kelompok sampel yang saling berhubungan.

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:

1. Menentukan Hipotesis

Ho : Tidak ada terdapat perbedaan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan UU no. 28 tahun 2009

Ha : Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No. 28 tahun 2009.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. (uji dilakukan 2 sisi karena untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan, jika 1 sisi digunakan untuk mengetahui hubungan lebih kecil atau lebih besar)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan pengujian melalui *Paired T-Test*, maka data tersebut diolah oleh SPSS dengan menggunakan *Paired T-Test*, Penentuan t-tabel menggunakan ketentuan tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan $df = n-k$ didapatkan nilai t-tabel sebesar 1,746.

Tabel 1.1
Kesimpulan atas Uji Hipotesis

Hipotesis	Keterangan	Mean 2010	Mean 2012	Uji t Sign	Keputusan Penelitian
H1	Rata-rata Kemandirian Daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 berbeda secara signifikan.	18.8765	32.8535	0.000	Diterima
H2	Rata-rata derajat desentralisasi sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 berbeda secara signifikan.	15.4029	23.2441	0.000	Diterima
H3	Rata-rata ketergantungan keuangan daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 berbeda secara signifikan.	81.0771	73.2665	0.002	Diterima
H4	Rata-rata efektivitas keuangan sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 tidak berbeda secara signifikan.	96.8459	1.0528E2	0.065	Ditolak
H5	Rata-rata efisiensi pajak daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 berbeda secara signifikan.	8.0241	3.1682	0.001	Diterima
H6	Rata-rata kontribusi pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009 berbeda secara signifikan.	47.8824	64.9412	0.000	Diterima

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan hasil dari analisis statistik maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pada pemerintahan Kabupaten/Kota dalam bentuk desentralisasi fiskal pada era sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009. Perbedaan kinerja ini mengarah kearah yang lebih baik, ini dapat dilihat dari enam rasio yang dihitung semuanya mengalami peningkatan. Untuk rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami kenaikan dari tahun 2010 sebesar 18,88% menjadi tahun 2012 sebesar 32,85%.

- 2) Terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk upaya fiskal pada era sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No.28 Tahun 2009. Perbedaan kinerja ini mengarah kearah yang lebih baik, ini dapat dilihat dimana Derajat desentralisasi mengalami kenaikan dari tahun 2010 diperoleh rata-rata yaitu sebesar 15,40% menjadi tahun 2012 sebesar 23,24%.
- 3) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk kemampuan pembiayaan pada era sebelum dan sesudah diberluakukannya UU No.28 Tahun 2009. Perbedaan ini dapat dilihat dimana dari rasio yang dihitung mengalami kenaikan. Rasio ketergantungan keuangan daerah mengalami penurunan dari rata-rata ditahun 2010 sebesar 81,08% menjadi ditahun 2012 sebesar 72,37%.
- 4) Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk kemampuan pembiayaan pada era sebelum dan sesudah diberluakukannya UU No.28 Tahun 2009. Tidak terdapat perbedaan ini dapat dilihat dimana dari rasio yang dihitung mengalami kenaikan yang sangat kecil. Rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan dari rata-rata ditahun 2010 yaitu sebesar 96,85% menjadi ditahun 2012 sebesar 105,28%.
- 5) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk kemampuan pembiayaan pada era sebelum dan sesudah diberluakukannya UU No.28 Tahun 2009. Perbedaan ini dapat dilihat dimana dari rasio yang dihitung mengalami kenaikan. Rasio efisiensi pajak daerah mengalami penurunan dari rata-rata ditahun 2010 yaitu sebesar 6,44% dan di tahun 2012 sebesar 2,91%.
- 6) Terdapat perbedaan yang signifikan pada kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk kontribusi pajak dan retribusi daerah pada era sebelum dan sesudah diberluakukannya UU No.28 Tahun 2009. Perbedaan ini dapat dilihat dimana dari rasio yang dihitung mengalami kenaikan. Derajat kontribusi pajak dan retribusi daerah mengalami kenaikan dari rata-rata ditahun 2010 yaitu sebesar 38,13% dan di tahun 2012 sebesar 39,42%.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan kinerja sebelum dan sesudah penerapan UU No.28 Tahun 2009. Ini dapat dilihat dari tingginya tingkat pembiayaan daerah dari pemerintah pusat cukup tinggi dan tekanan keuangan yang mengakibatkan kinerja pemerintah daerah bergeser naik maupun turun. Pergeseran ini secara rata-rata cenderung mengalami peningkatan dari yang sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Hasil penelitian terbukti bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah pada tingkat kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari penerimaan PAD terhadap pendapatan daerah sebelum dan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
2. Analisis derajat desentralisasi daerah menunjukkan terdapat perbedaan pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia sebelum dan setelah penerapan undang-undang nomor 28 tahun 2009.
3. Penerapan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 memberikan perubahan pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia pada tingkat ketergantungan keuangan daerah setelah penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara rata-rata lebih kecil nilainya daripada sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun Kota Gorontalo dan Kota Pekanbaru mengalami peningkatan ketergantungan keuangan daerah.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam merealisasikan pendapatan daerah yang membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dengan target penerimaan asli daerah, sebelum dan sesudah penerapan UU No. 28 tahun 2009. Namun terdapat penurunan tingkat efektifitas keuangan pada Kota Medan dan Kota Gorontalo.
5. Analisis mengenai perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota pada tingkat efisiensi pajak daerah memiliki perbedaan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 secara rata-rata lebih efisien daripada sebelum penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Namun untuk Kota Surabaya, Pontianak dan Deli Serdang mengalami penurunan tingkat efisiensi keuangan.
6. Terdapat perbedaan antara kinerja keuangan pemerintah daerah tingkat kontribusi pajak daerah keuangan daerah pada Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam merealisasikan penerimaan pajak dan retribusi yang dibandingkan dengan total pendapatan daerah.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada 17 Kabupaten / Kota saja di Indonesia, dikarenakan Kabupaten/Kota yang sudah menerapkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 hanya terdapat 17 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Sehingga hasil penelitian belum bisa mencerminkan praktik kinerja keuangan Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
2. Waktu penelitian ini hanya dilakukan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam dua tahun dikarenakan pemberlakuan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tersebut hanya baru mulai berlaku pada tahun 2011 dan ketersediaan data yang dapat diperoleh hanya baru sampai dengan tahun anggaran 2012, sehingga tidak bisa dilakukan analisis trend.
3. Penelitian ini dilakukan pada periode dengan ekspektasi waktu yang terlalu sempit untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini akan memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai dampak perubahan Undang-undang terhadap kinerja keuangan yang dilakukan pada periode dan ekpektasi yang lebih panjang.
4. Penelitian ini menggunakan uji *paired sample t-test* dimana dalam pengujiannya tidak dapat memasukkan variabel kontrol yang digunakan untuk menghambat faktor lain yang tidak diteliti sehingga hasil penelitian masih dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti.

5.3 Saran

Adanya keterbatasan dalam penelitian ini menjadi dasar diajukan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan periode dua tahun saja, sehingga disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan periode yang lebih panjang sehingga lebih menggambarkan secara keseluruhan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengukuran kinerja keuangan hendaknya dapat dijadikan rekomendasi pelaksanaan laporan keuangan Pemerintah/Kota di Indonesia sebagai bahan koreksi dan masukkan untuk peningkatan peran pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas publik.
3. Untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah maka pemerintah perlu melakukan upaya maksimal meningkatkan usaha pemungutan Pendapatan asli daerah secara lebih intensif dan aktif. Dalam hal ini juga pemerintah daerah perlu menetapkan target penerimaan secara lebih baik dan terukur, melakukan penyesuaian dengan peraturan yang terkait dengan usaha peningkatan PAD, memperbaiki kinerja BUMD dan mencari sumber-sumber PAD yang baru tanpa harus menunggu ketetapan dari Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Pusat.
4. Penelitian berikutnya disarankan untuk mengikutsertakan variabel kontrol (pengendali) sehingga tidak ada faktor lain yang tidak diteliti mempengaruhi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abut, Hilarius. 2004. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Diadit Media
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aryanto, Rudi. 2011. "Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Disumatera Selatan." *Jurnal Ilmiah*, Vol III No.2
Portal.kopertis2.or.id/jspui/bitstream/.../1/Rudi32.pdf
- Bratakusuma, D.S. dan Solihin, Dadang. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Bastian, I. 2002. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga
- Davey, K.J. 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Jakarta: UI - Press
- Devas Nick, Brian Binder, Anne Booth, Roy Kelly. 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI – Pres
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat - Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Dwirandra, A.A.N.B. 2006. *Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2002-2006*. Universitas Udayana.
- Fahmi, M. 2011. *Analisis Kinerja Keuangan Panduan bagi Akademisi, Manajer, dan Investor untuk Menilai dan Menganalisis Bisnis dari Aspek Keuangan*. Bandung: CV. Alfabeta
- Fatwa, A.M. 2002. *Otonomi Daerah & Demokratisasi Bangsa*. Jakarta: Yarsif Watampone
- Fred R. David, 2011. *Strategik Management Concep*. Pearson: England
- Ghozali, dkk (2012) "Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah melalui analisis rasio keuangan APBD." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No.1 pp. 201-210. Diakses tanggal 14 maret 2014, dari e-jurnal.undip.ac.id
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. BP Undip: Semarang

- Gujarati, Damodar. 1991. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Halim, Abdul, 2001. *Analisis Diskripsi Pengaruh Fiskal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK. STIE YO. Yogyakarta. 127-146.
- _____. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN
- _____, 2002. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Haryanto, Salmuddin dan Arifuddin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hananto, Ligwina P. 2010. "Sehatkah Keuangan Anda." pp.n.p, <http://www.masfarid.com>. Diakses tanggal 5 Mei 2014.
- Henderson, Dale A, Burce W. Chase and Benjamin Woodson. 2002. *Performance Measure for Non Profit Organisation*. Radfor University. Diakses 2 Mei 2014, dari Journal Of Accountancy.
- Kawedar, Wrsito. Abdulrahman, Handayani, Sri. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah & Akuntansi Keuangan Daerah*. Jilid 1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Kurniati, Siti. 2012. "Analisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Jawa tengah sebelum dan sesudah krisis ekonomi." *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Ladjin, Nurjanna. 2008. "Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah)." Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Mahmudi. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*. Yogyakarta: STIM YKPN
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI Yogyakarta: Yogyakarta.
- _____. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- _____. 1999. *Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik, PAU Studi Ekonomi UGM*: Yogyakarta.
- Marsyahrul, Tony. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Nordiawan, D. I.S. Putra, dan Rahmawarti M. ,2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT.Grasindo
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Depdagri RI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Depdagri RI.
- Resmi, Siti. 2001. *Perpajakan Teori & kasus*. Buku Satu. Jakarta : Salemba Empat
- Sekaran, Uma. 2007. *Research Methods For Business*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah"; Makalah terpublikasi pada situs www.djpkpd.go.id. Diakses 1 April 2006
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfa Beta
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk keuangan dan pembangunan daerah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Supranto, J. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga
- Supranjitno, Pudji. 2003. "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Fiskal Daerah." (Studi Kasus Di Kabupaten Banjarnegara). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro: Semarang.
- Susantih, Heny dan Yulia Saftiana. 2007. *Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi se-Sumatra Bagian Selatan*. Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
- Usman and Setiadi, 2006. *Pengantar Statistika*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Wahyuni, Nanik. 2011. "Analisis Rasio untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah kota malang." Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN MALIKI: Malang
- Widjaja, HAW. 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- <http://ririsatria40-wordpress.com/2010/04/02/resource-based-theory> (sumber: Barney and Clark, 2007. "Resource-Based-Theory")
- www.bpk.go.id
- www.djpk.go.id
- www.pajak.go.id 2012. *Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai pajak daerah*